



TATKALA HUTAN LAMPUNG DIKORUPSI: DUIT RP1,003 T MENGGUNUNG DI KEJAGUNG

Tumpukan uang memenuhi meja di hadapan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Kamis (10/9/2026). Bundel demi bundel rupiah yang diamankan dalam perkara dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan di Lampung hanya ditata sebagian, karena ruangan tak cukup. Nilainya total sebenarnya Rp1.003.680.250.000 atau lebih dari Rp1 triliun. Jika seluruh uang tersebut berupa pecahan Rp100 ribu, jumlahnya mencapai sekitar 10 juta lembar. Dengan asumsi ketebalan setiap lembar sekitar 0,1 milimeter, volume seluruh uang itu hampir 9,9 meter kubik. Artinya, bila semua uang ditumpuk dengan ukuran kasur king size (1,8 x 2 meter, red), maka tingginya menggunung hingga langit-langit rumah atau sekitar 2,7 meter. Dalam penjelasannya, kejaksaan menyebut uang triliunan itu sebagai bagian dari upaya penyelamatan keuangan negara, yang terdiri atas uang titipan dan uang sitaan. Detil kasusnya yaitu terkait penggunaan kawasan hutan sekitar 1.268 hektare untuk perkebunan tebu oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI) di areal PT Inhutani V, Lampung. Perkara ini sebelumnya ditangani Kejaksaan Tinggi Lampung, kemudian diambil alih Kejaksaan Agung pada 7 September 2026. Besaran kerugian negara dalam perkara ini sendiri masih dihitung oleh penyidik. Pertanyaan terpenting pun muncul, kemana dan siapa saja yang kecipratan uang 'panas' itu? BACA HAL 11...

FAKTA KASUS DUGAAN KORUPSI LAHAN TEBU

RP 1,003 TRILIUN
DIAMANKAN

- Nilai uang: **Rp1.003.680.250.000**
- Berupa uang titipan dan uang sitaan
- Ditujukan untuk asset recovery/ pengembalian kerugian negara
- Belum dapat disebut sebagai kerugian negara final

- Pengembalian uang tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana

LAHAN YANG DIUSUT

- Lokasi: Way Kanan, Lampung
- Perusahaan: PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI)
- Berkaitan dengan areal PT Inhutani V
- Lahan yang dibuka untuk perkebunan tebu: 1.268 hektare
- Status bagian lahan yang masuk kawasan hutan masih didalam penyidik

Penampakan tumpukan uang terkait korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan perkebunan di area PT Inhutani V, Lampung, Kamis (10/9/2026). (ist)

PENYITAAN DAN PENITIPAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Dari PT PSMI dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Perkebunan pada Areal PT Inhutani V Provinsi Lampung

Rp1.003.184.000.000,-
 (satu triliun tiga miliar seratus delapan puluh empat juta rupiah)

USD 166.000
 (seratus enam puluh enam ribu United States Dollar)

Jakarta, 10 September 2026

LUHUT UNGKAP 77,6% BANSOS TAK TEPAT SASARAN

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengungkap persoalan besar dalam penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan hasil uji coba digitalisasi perlindungan sosial di Banyuwangi, Jawa Timur, pemerintah menemukan 77,6 persen penyaluran bansos tidak tepat sasaran.

DIGITALISASI BANSOS JARING RATUSAN RIBU KELUARGA

Pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH)

- Total Pendaftar: 641.647 keluarga
- Berpotensi layak: 151.337 keluarga (23,60%)
- Tidak layak: 487.033 keluarga (75,89%)
- Proses verifikasi: 3.277 keluarga (0,51%)

Pendaftar Bansos Sembako

- Total Pendaftar: 679.088 keluarga
- Berpotensi layak: 281.932 keluarga (41,53%)
- Tidak layak: 393.778 keluarga (58,02%)
- Proses verifikasi: 3.379 keluarga (0,45%)

(Data Kemensos, per 7 Juli 2026)

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Konferensi Pers Gerakan Nasional Perlinsos Digital dan Percepatan Piloting Perlinsos Digital. (Dok. DEN)



Status ekonomi sebuah keluarga dapat berubah, sementara data administrasi tidak selalu bergerak secepat perubahan tersebut.

Karena itu, pemerintah menargetkan tingkat ketidaktepatan penyaluran dapat ditekan hingga di bawah 10 persen.

Pemerintah sebelumnya telah menjadikan Banyuwangi sebagai lokasi piloting digitalisasi Perlinsos. Dalam sistem tersebut, pemerintah mengintegrasikan berbagai data untuk membantu menentukan kelayakan penerima bantuan. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanggah agar masyarakat dapat memperbaiki data apabila hasil verifikasi sistem tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelumnya menyebut Banyuwangi sebagai lokus piloting nasional digitalisasi Perlinsos. Tahapannya mencakup pengusulan, uji kelayakan, sanggah, hingga penyaluran bantuan kepada keluarga penerima manfaat. BPKP juga menyoroti pentingnya mengantisipasi potensi keluarga miskin dan rentan yang justru terlewat dalam sistem.

Dalam pengembangan berikutnya, pemerintah berencana memperluas sistem tersebut ke 215 daerah.

"Kita sudah ada piloting di satu kabupaten di Banyuwangi. Dan itu modal utama sekarang kita piloting sudah 215 kabupaten. Dan kami ajak juga teman-teman Polri dan TNI dan juga yang lain, masyarakat semua saja," kata Luhut.

Sebelumnya, pemerintah telah menyatakan perluasan digitalisasi Perlinsos dilakukan secara bertahap. Pada Juni 2026, Dewan Ekonomi

Nasional menyebut keberhasilan piloting Banyuwangi menjadi fondasi perluasan sistem ke 42 kabupaten/kota dan satu provinsi. Sistem itu dirancang dalam bentuk portal, bukan aplikasi, dengan proses pendaftaran yang menggunakan NIK dan verifikasi wajah.

Digitalisasi juga diarahkan untuk memperbaiki dua jenis kesalahan dalam program perlindungan sosial, yakni inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika warga yang tidak berhak justru masuk sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika warga yang sebenarnya memenuhi syarat justru tidak memperoleh bantuan.

Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut disiapkan untuk membantu pemerintah memperbarui dan memeriksa data penerima. Dalam penjelasan sebelumnya, sistem yang dikembangkan pemerintah disebut dapat memeriksa sejumlah indikator, antara lain data kependudukan, konsumsi listrik, serta pendapatan atau upah sebelum menentukan kelayakan penerima.

50 Juta Penerima Dibuatkan Rekening

Digitalisasi tidak berhenti pada pembaruan data. Pemerintah juga menyiapkan perubahan mekanisme pembayaran bansos.

Luhut mengatakan sekitar 50 juta masyarakat dari kelompok desil 1 sampai 4 akan menerima bantuan sosial secara langsung melalui rekening bank. Kelompok tersebut merupakan masyarakat yang masuk kategori paling miskin.

"Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya, nanti saya kira fiskal," ujar Luhut.

Pemerintah juga sepakat meninggalkan pola transfer tunai. Penyaluran akan diarahkan menggunakan transaksi non-tunai atau cashless transaction.

"Kita sepakat tidak ada lagi nanti cash transfer. Jadi semua cashless transaction. Jadi itu juga untuk mengurangi korupsi. Jadi nanti kalau ada orang yang nyogok-nyogok, ya duitnya tidak bisa lagi dia taruh ke bank karena harus ada underlinenya," kata Luhut.

Perubahan tersebut diharapkan membuat aliran dana bantuan lebih mudah dilacak sekaligus mengurangi ruang terjadinya penyimpangan dalam penyaluran.

Sebelumnya, pemerintah juga menyatakan digitalisasi perlindungan sosial dapat membantu mengurangi beban fiskal karena ketepatan sasaran meningkat. Pada Juni 2026, Luhut bahkan menyebut potensi penghematan dapat mencapai jumlah yang besar karena selama ini 77,6 persen penyaluran disebut tidak sesuai target.

Roll Out Ditargetkan Oktober

Pemerintah kini mengejar penyelesaian sistem sebelum diterapkan secara lebih luas. Luhut mengatakan roll out digitalisasi bansos ditargetkan berlangsung pada pekan ketiga Oktober 2026.

"Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai," jelasnya.

Meski begitu, pemerintah masih menghadapi persoalan klasifikasi desil. Luhut mengakui pembenahan data tidak sederhana karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah.

Sementara itu, penyaluran bansos melalui rekening bank belum langsung dilakukan tahun ini. Luhut mengatakan pemerintah menggunakan sisa waktu 2026 untuk menyelesaikan dan merapikan basis data.

"Kalau didistribusikan kita uji coba nanti pada kuartal 1 tahun depan. Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib," katanya.

Dengan demikian, uji coba penyaluran bansos melalui rekening ditargetkan berlangsung pada kuartal I 2027.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya mengatakan sekitar 50 juta masyarakat berpotensi mengakses portal digitalisasi bansos. Pemerintah menyiapkan stress test dan load test untuk memastikan sistem mampu menangani jumlah pengguna dalam skala besar sekaligus menjaga keamanan data. (tin,rls,kum/dya)

10 POIN TUNTUTAN BURUH YANG DISAMPAIKAN DALAM AKSI KAWAL RUU PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

- UU Ketenagakerjaan yang pro-buruh
- Kepastian kerja, termasuk penghentian praktik outsourcing, PKWT berkepanjangan, dan penyalahgunaan pekerja magang.
- Upah yang layak dan berpihak pada kesejahteraan pekerja.
- Perlindungan pekerja platform, seperti pengemudi ojol, serta pekerja yang terdampak perubahan teknologi.
- Jaminan pesangon dan perlindungan dari PHK sepihak.
- Penguatan serikat pekerja, termasuk jaminan kebebasan berserikat dan hak mogok.
- Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai bagian penting dalam pembangunan ketenagakerjaan.
- Penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar hak pekerja.
- Perlindungan pekerja perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok pekerja rentan.
- Peningkatan keterampilan (upskilling) dan reskilling agar pekerja mampu menghadapi perubahan dunia kerja.



BURUH DESAK JAMINAN PESANGON MASUK RUU KETENAGAKERJAAN

Bagi buruh, pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan sekadar kehilangan pekerjaan. Persoalan yang tak kalah genting adalah apakah hak setelah PHK benar-benar sampai ke tangan mereka. Masalah itu kembali mencuat ketika buruh mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang kini digodok DPR bersama pemerintah. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah memastikan hak pesangon pekerja tidak kembali hilang ketika perusahaan tutup, pailit, atau mengalami persoalan keuangan.

Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) SPSI mendesak DPR memasukkan skema Jaminan Pesangon dalam RUU tersebut. Ketua Umum PP FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan hak pesangon sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persoalannya terletak pada pelaksanaan, terutama ketika perusahaan tidak lagi mampu membayar kewajibannya.

Desakan itu memperoleh titik temu dengan gagasan yang tengah muncul di DPR. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh sebelumnya menyebut RUU Pelindungan Ketenagakerjaan mengusulkan perluasan jaminan sosial pekerja, termasuk jaminan pesangon.

Usulan tersebut tercantum dalam Pasal 129 draf RUU. Menurut Nihayatul, skema itu merupakan usulan DPR, bukan berasal dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) maupun serikat buruh. Selama ini, perusahaan memang melakukan pencadangan kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam PSAK 24. Namun, dana tersebut masih berada di dalam perusahaan dan tidak dipisahkan dari kekayaan perusahaan.

"Nah sekarang ditarik langsung dan dimasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan sehingga jika nanti ada suatu problem tidak lagi memberatkan pengusaha," kata Nihayatul, Kamis (10/9/2026).

Ia mengatakan gagasan tersebut antara lain berkaca pada kasus kepailitan perusahaan besar yang

membuat pekerja kesulitan memperoleh haknya. Salah satu contoh yang disebut adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Menurut Nihayatul, kasus tersebut berdampak pada sekitar 10.000 pekerja yang tidak memperoleh pesangon.

"Contoh, seperti kasus Sritex. 10.000 pekerjanya tidak dapat pesangon," ujarnya.

Dalam skema yang didorong DPR, kontribusi tidak hanya dibebankan kepada perusahaan. Nihayatul mengatakan pemerintah juga diharapkan ikut memberikan kontribusi.

"Tidak harus 100 persen, tetapi yang penting ada kontribusi dari pemerintah karena selama ini yang ada hanya kontribusi dari perusahaan saja," katanya.

Namun, bagi kelompok buruh, keberadaan pasal tentang jaminan pesangon belum otomatis membuat RUU tersebut memenuhi harapan. Kamis (10/9/2026), buruh turun ke jalan di sejumlah daerah untuk mengawal pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPI) sebelumnya memperkirakan sekitar 50 ribu buruh mengikuti aksi di sedikitnya 30

kabupaten/kota. Aksi berlangsung antara lain di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Di Jakarta, 25 perwakilan buruh diterima Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. Ia berjanji meneruskan tuntutan mereka kepada DPR RI. Dalam audiensi tersebut, buruh membawa 10 tuntutan, mulai dari kepastian kerja, upah layak, perlindungan pekerja platform, hingga jaminan pesangon dan pencegahan PHK sepihak.

Suhud mengakui masih terdapat persoalan dalam aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Ia mengatakan buruh merupakan bagian penting dari roda ekonomi sehingga hak mereka harus dipenuhi.

"Tidak boleh dalam hubungan kerja ada kezaliman, tidak boleh dalam hubungan kerja ada eksploitasi, tidak boleh dalam hubungan kerja ada yang dirugikan, dan apalagi sampai terzalimi," ujar Suhud.

Buruh juga meminta perlindungan lebih kuat bagi pekerja kontrak, pekerja alih daya, pekerja perempuan,

pekerja disabilitas, dan pekerja rentan. Mereka mendorong kebebasan berserikat, hak mogok, penegakan hukum yang lebih tegas, serta program peningkatan dan pengalihan keterampilan atau upskilling dan reskilling.

Persoalan kontrak menjadi salah satu titik perdebatan. KBPI menilai draf RUU masih memungkinkan hubungan kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berlangsung hingga empat tahun. Serikat buruh meminta masa tersebut dibatasi maksimal satu tahun.

Ketua Umum Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Rudi HB Daman menilai draf RUU masih membawa semangat omnibus law. "RUU inisiatif DPR ini adalah masih jauh dari harapan buruh. Undang-undang ini salah satunya masih memiliki semangat Omnibus Law," kata Rudi.

Koalisi juga mempersoalkan skema pemagangan. Buruh meminta pemagangan tidak digunakan sebagai jalan masuk untuk memperoleh tenaga kerja murah. Jika tetap dipertahankan, Rudi mengatakan pemagangan semestinya hanya diperuntukkan bagi siswa dan mahasiswa untuk kepentingan pendidikan dengan durasi maksimal tiga bulan. (tin ist, tir/dya)

Buntut Fatwa Sound Horeg MUI Jatim

PENGUSAHA SEBUT ‘GOBLOK’, BERUJUNG MINTA MAAF

Polemik sound horeg di Jawa Timur kembali memanaskan. Kali ini, seorang pengusaha sound horeg menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur “goblok” setelah mempermasalahkan fatwa MUI terkait penggunaan sound horeg. Fatwa yang dimaksud adalah Fatwa MUI Jatim Nomor 1 Tahun 2025. Mencuat juga fakta jika, sepanjang Agustus 2026, sedikitnya tiga orang meninggal dalam insiden yang berkaitan dengan parade atau kegiatan sound horeg di Jawa Timur.

Pernyataan itu disampaikan Setyo Budi Sularso, pengusaha sound horeg sekaligus pemilik Aeromax, dalam acara Catatan Demokrasi bertajuk “Sound Horeg: Musik Berujung Petaka” yang disiarkan langsung di televisi nasional, Selasa (8/9/2026).

Dalam acara tersebut, Setyo mengkritik fatwa MUI Jatim yang menyatakan penggunaan sound horeg haram. Ia kemudian menggunakan kata “goblok” ketika menyampaikan kritik terhadap MUI Jatim.

Moderator acara sempat memperingatkan Setyo agar mengganti diksi tersebut karena disampaikan dalam siaran langsung.

Pernyataan itu kemudian viral di media sosial dan memicu respons dari MUI Jatim.

Polemik itu kemudian berujung pada permintaan maaf Setyo Budi Sularso.

Pada Rabu malam (9/9/2026), Setyo mendatangi kediaman Ketua MUI Kabupaten Karanganyar KH Badarudin.

Di hadapan pengurus MUI Karanganyar, Setyo menyampaikan penyesalan atas pernyataannya dalam acara televisi tersebut. Ia juga meminta maaf kepada MUI Jawa Timur, MUI Jawa Tengah, MUI Pusat, dan MUI Kabupaten Karanganyar.

“Saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap MUI Jawa Timur pada saat acara di TV One. Saya memohon maaf kepada MUI Jawa Timur, MUI Jawa Tengah, MUI Pusat, dan MUI Kabupaten Karanganyar,” ujar Setyo.

Setyo juga menyatakan tidak akan mengulangi perkataannya.

“Saya menyesal atas perkataan yang saya sampaikan terhadap MUI Jawa Timur, saya tidak akan mengulang perbuatan tersebut, dan saya bertaubat,” katanya.

Sementara, Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim KH Ma’ruf Khozin mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan ucapan tersebut. Menurut dia, perbedaan pandangan mengenai fatwa tetap dapat dibicarakan dengan cara yang baik.

Ma’ruf mengatakan dalam acara tersebut terdapat dua pengusaha sound horeg, yakni David dan Setyo. Menurut dia, David sebelumnya sudah beberapa kali berdiskusi dengan MUI Jatim mengenai persoalan sound horeg.

“Kalau Mas David itu ya sopan lah ya, ketimuran juga. Bahkan Mas David teman saya,” kata Ma’ruf.



(Ilustrasi) MUI Jatim telah mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar menerbitkan keputusan larangan sound horeg.ist

Menurut Ma’ruf, David juga bersedia melakukan sejumlah penyesuaian terhadap pertunjukan sound horeg, termasuk menghindari penggunaan dancer dan memperhatikan persoalan tingkat kebisingan.

“Dancer-nya dihindari. Nah, ini desibelnya,” ujar Ma’ruf.

Berbeda dengan David, Ma’ruf mengatakan dirinya belum pernah bertemu dengan Setyo sebelum pertemuan di studio televisi. Karena itu, ia mengaku kaget ketika Setyo langsung menggunakan kata “goblok” dalam pembahasan mengenai fatwa MUI.

“Pak Budi ini tidak pernah berjumpa. Ah, langsung ketemu di studio. Belum apa-apa langsung ngomong ‘goblok,’” kata Ma’ruf.

Ma’ruf kemudian menjelaskan bahwa proses penyusunan fatwa di Komisi Fatwa MUI tidak dilakukan secara sembarangan. Menurut dia, para anggota komisi melewati proses penyaringan berdasarkan latar belakang, kiprah, dan karya mereka.

“Di Komisi Fatwa itu screening-nya ketat, dua kali screening. Dilihat latar belakang, dilihat kiprahnya, dilihat karya-karyanya,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah anggota Komisi Fatwa MUI memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

“Ada yang S3, bahkan sudah guru besar,” kata Ma’ruf.

Polemik tersebut tidak bisa dilepaskan dari fatwa MUI Jatim mengenai penggunaan sound horeg. Fatwa yang dimaksud adalah Fatwa MUI Jatim Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg.

Fatwa itu lahir setelah MUI Jatim menerima permohonan fatwa pada 3 Juli 2025. Ketika itu, penggunaan sound horeg telah memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Bahkan, terdapat

petisi penolakan yang telah mengumpulkan 828 tanda tangan per 3 Juli 2025.

Dalam penjelasan MUI, persoalan yang dinilai bukan semata-mata keberadaan perangkat sound system. MUI membedakan penggunaan sound system secara umum dengan fenomena sound horeg yang dalam praktiknya dapat disertai suara berintensitas tinggi, gangguan terhadap lingkungan, serta aktivitas lain yang dinilai bertentangan dengan ketentuan agama.

MUI juga menyebut dampak kesehatan, ketidaknyamanan masyarakat, gangguan ketertiban, serta potensi munculnya aktivitas seperti tarian yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat sebagai bagian dari pertimbangan dalam fatwa tersebut.

Karena itu, fatwa MUI Jatim tidak dapat dimaknai bahwa seluruh penggunaan penguas suara atau sound system otomatis haram. MUI Jatim dalam penjelasan terbarunya menegaskan bahwa sound system sebagai teknologi tetap boleh digunakan untuk kegiatan positif dengan volume yang wajar dan tidak disertai aktivitas yang dilarang.

Namun, posisi MUI Jatim terhadap

praktik sound horeg yang dinilai menimbulkan mudarat menjadi semakin tegas setelah muncul sejumlah insiden pada 2026.

Sepanjang Agustus 2026, sedikitnya tiga orang meninggal dalam insiden yang berkaitan dengan parade atau kegiatan sound horeg di Jawa Timur. Kasus tersebut terjadi di Jember dan Banyuwangi.

Korban pertama adalah SN, 29 tahun, kru sound horeg di Jember. Ia meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk yang mengangkut perangkat sound system. Peristiwa itu terjadi pada 2 Agustus 2026 setelah rombongan mengikuti karnaval di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji.

SN diduga tertidur di atas bak truk ketika kendaraan melintas di bawah gapura pembatas di Jalan Krasak, Desa Candijati, Kecamatan Arjasa. Benturan tersebut menyebabkan luka fatal di bagian kepala.

Korban kedua adalah Bonari, 44 tahun, warga Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Ia meninggal ketika mengikuti karnaval sound horeg dalam rangka peringatan HUT ke-81 RI pada 23 Agustus 2026.

Bonari disebut sempat mengonsumsi minuman keras jenis arak sebelum mengikuti karnaval. Setelah berjalan sekitar satu kilometer dari garis start, tubuhnya mendadak oleng dan terjatuh. Ia kemudian dibawa ke Puskesmas Pesanggaran, tetapi nyawanya tidak tertolong. Parade sound horeg akhirnya dihentikan.

Korban ketiga adalah Slamet Timbang, 57 tahun, warga Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Jember. Ia meninggal pada 29 Agustus 2026 setelah tertimpa kanopi dan tembok sebuah apotek ketika sedang menunggu istrinya membeli obat. (gus,ist,kum/dya)



(Ilustrasi) MUI Jatim telah mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar menerbitkan keputusan larangan sound horeg.ist

Sidang Dugaan Korupsi Haji Ungkap Catatan Pembagian Kuota MAKTOUR 1.000, NU 1.900, BIN DAN DPR 200

Sebuah catatan pembagian kuota haji khusus membuka bagian lain dari perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Di dalamnya tercantum sejumlah nama dan kelompok, mulai dari Maktour, Nahdlatul Ulama (NU), Badan Intelijen Negara (BIN), DPR, hingga "Para Gus". Catatan tersebut dibawa ke ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta ketika jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan pegawai honorer Kementerian Agama, Ridwan Kurniawan, pada persidangan yang berlangsung Selasa (8/9/2026) hingga Rabu (9/9/2026) dini hari.

Dalam catatan itu tertulis RF 500, MKTR 1.000, BIN 200, DPR 200, "Para Gus" 200, NU 1.900, Forum SATHU tanda tanya, serta Subdit 1.500. Jaksa KPK membacakan isi catatan tersebut di hadapan majelis hakim.

"RF 500, MKTR 1.000, BIN 200, DPR 200, Para Gus 200, NU 1.900, Forum Sathu tanda tanya. Pengertian Subdit 1.500 itu apa, Pak? Subdit yang membidangi masalah haji khusus, begitu maksudnya?"

"Iya, estimasinya 1.500," jawab Ridwan.

Ridwan mengakui dirinya yang mengetik catatan tersebut. Namun, ia menegaskan tidak membuat pembagian itu berdasarkan kehendaknya sendiri. Ia mengaku mengetik berdasarkan arahan pihak lain.

Keterangan Ridwan menjadi penting karena catatan tersebut menggambarkan adanya pembagian kuota kepada sejumlah pihak di luar jemaah yang menunggu keberangkatan melalui mekanisme reguler.

Jaksa kemudian membongkar satu per satu singkatan dalam catatan itu.

"RF ini siapa, Pak?" tanya jaksa.

"RF, Rizky Fisa," jawab Ridwan.

"Rizky Fisa, dia sendiri dapat 500 kuota?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Ridwan.

Jaksa lalu beralih kepada tulisan "MKTR".

"Kemudian MKTR?"

"Maktour," jawab Ridwan.

"Maktour. Berapa dapatnya?"

"1.000," jawab Ridwan.

Keterangan tersebut menempatkan Maktour sebagai salah satu pihak dengan alokasi terbesar dalam catatan yang dibacakan di persidangan.

Pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur, sebelumnya membantah perusahaannya memperoleh kuota tambahan dalam jumlah besar. Saat diperiksa KPK pada 28 Agustus 2025, Fuad mengatakan kuota yang diperoleh Maktour sangat terbatas.

"Maktour hanya jumlah yang sangat terbatas. Sangat kecil sekali, ya. Jadi, tidak ada bilang sampai ribuan apa semua. Nggak, ya," ujar Fuad kala itu.

Keterangan Fuad tersebut kini berhadapan dengan isi catatan yang



Eks Menpora Dito Ariotedjo (tengah) dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/9/2026).ist

dibacakan jaksa, yang mencantumkan Maktour sebanyak 1.000 kuota.

Fuad merupakan pendiri Maktour dan masih berstatus sebagai saksi dalam perkara ini. Ia juga merupakan mertua mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Sementara itu, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham menjadi salah satu dari empat terdakwa dalam perkara tersebut. Tiga terdakwa lainnya ialah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, serta mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia, Asrul Aziz Taba.

Nama BIN juga tercantum dalam catatan dengan angka 200. Jaksa meminta Ridwan menjelaskan siapa yang dimaksud dengan BIN. Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani ikut meminta kejelasan mengenai tulisan tersebut.

"Anggota BIN maksudnya siapa, tuh? Diperjelas. Maksudnya Badan Intelijen?" tanya hakim.

"Iya," jawab Ridwan.

"Badan Intelijen Negara dapat jatah juga, begitu?" tanya Ni Kadek.

"Saya kurang tahu, waktu itu hanya menulis," jawab Ridwan.

Hakim kemudian menanyakan siapa yang membuat catatan tersebut.

"Yang menulis ini siapa?"

"Yang mengetik saya atas arahan Pak Muhi," jawab Ridwan.

Hal serupa terjadi ketika jaksa menggali tulisan "DPR 200".

"Sebentar, DPR ini refer ke Komisi VIII atau mana?" tanya jaksa KPK.

"Anggota DPR saja," jawab Ridwan.

Sampai bagian tersebut dibacakan di persidangan, belum terungkap siapa anggota DPR yang dimaksud ataupun apakah tulisan tersebut benar-benar menunjukkan adanya penerimaan kuota oleh anggota legislatif. Ridwan juga tidak mengaku mengetahui tujuan pembagian tersebut.

Posisi yang sama berlaku terhadap tulisan BIN. Kesaksian Ridwan hanya memastikan bahwa ia mengetik kata tersebut atas arahan, bukan bahwa BIN sebagai institusi terbukti menerima kuota haji.

Catatan itu juga memuat tulisan "Para Gus" dengan angka 200.

Jaksa kembali meminta Ridwan menjelaskan siapa yang dimaksud.

"Pecah dia, tidak jelas komisi mananya. Oke. Para Gus?"

"Para Gus, saya menulisnya banyak Para Gus," jawab Ridwan.

"Tidak, Para Gus itu merujuk kepada siapa?" tanya jaksa.

"Izin, Pak, saya waktu itu hanya mengetik saja," jawab Ridwan.

Nama NU kemudian muncul dengan angka yang lebih besar, yakni 1.900 kuota.

"Terakhir, punten, Pak, ada inisial NU, Pak. Ini maksudnya ke mana, nih?" tanya jaksa.

"Izin, Pak, jadi saya hanya mengetik, ya. Maksudnya NU, tetapi yang waktu itu saya tahu, NU itu Nahdlatul Ulama," jawab Ridwan.

Dengan demikian, catatan tersebut mencantumkan sedikitnya 1.900 kuota untuk NU, 1.000 untuk Maktour, 500 untuk RF, masing-masing 200 untuk BIN, DPR dan "Para Gus", serta 1.500 yang dikaitkan dengan Subdirektorat Haji Khusus.

PEMBAGIAN KUOTA HAJI YANG DIUNGKAP SAAT SIDANG

- Maktour: 1.000 kuota
- NU: 1.900 kuota
- BIN: 200 kuota
- DPR: 200 kuota
- "Para Gus": 200 kuota
- RF/Rizky Fisa: 500 kuota
- Subdit: 1.500 kuota

Forum SATHU: ditulis dengan tanda tanya dalam catatan

Keterangan penting

- Data tersebut muncul dalam catatan yang diperlihatkan jaksa dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji.
- Saksi Ridwan Kurniawan membenarkan isi catatan tersebut.
- Kuota 1.500 disebut berkaitan dengan paket yang diisi PIHK dan menjadi sumber "fee percepatan" bagi jemaah yang ingin berangkat pada tahun yang sama (T0).
- Ridwan menyebut BIN dalam catatan itu sebagai Badan Intelijen Negara.

Sumber: Berbagai Sumber Diolah

Namun, persidangan belum mengungkap secara rinci siapa penerima akhir dari alokasi-alokasi tersebut. Ridwan berulang kali menegaskan bahwa perannya sebatas mengetik berdasarkan arahan.

Jaksa juga mendalami angka 1.500 yang dalam catatan disebut berkaitan dengan Subdirektorat Haji Khusus.

Kuota tersebut diduga diisi melalui sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Dalam konstruksi perkara, kuota itu berkaitan dengan dugaan pemberian "fee percepatan" keberangkatan.

Skemanya memungkinkan jemaah yang membayar sejumlah uang memperoleh keberangkatan pada tahun yang sama atau dikenal dengan istilah T0.

KPK sebelumnya menyebut perkara ini tidak hanya menyangkut perubahan komposisi kuota haji, tetapi juga dugaan praktik yang membuat sejumlah PIHK memperoleh keuntungan dari kuota tambahan.

Dalam perkara ini, BPK menghitung dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622,09 miliar. Sebanyak 313 PIHK juga disebut dalam konstruksi perkara sebagai pihak yang diduga ikut diperkaya. (tin,kcm,ist/dya)

Pengembangan RSUD Kanjuruhan Butuh Rp350 M, Skema KPBU Disiapkan



Kanjuruhan akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk memperkuat layanan kesehatan. Terlebih untuk penanganan penyakit kanker, jantung, urologi, dan stroke," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tommie Herawanto, dikutip pada Kamis (10/9/2026).

Disebutkannya, kebutuhan anggaran untuk pengembangan tersebut

diperkirakan mencapai Rp300 miliar hingga Rp350 miliar. Pembangunan akan dilakukan di lahan aset milik Pemkab Malang yang berada di belakang RSUD Kanjuruhan.

Menurut Tomie, lahan yang tersedia memiliki luas sekitar 2 hektare. Kendati demikian, belum ditentukan berapa luas lahan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas baru tersebut.

Menurut Tommie, pengembangan layanan ini diperlukan untuk menambah sekaligus memperkuat fasilitas kesehatan yang telah tersedia di RSUD Kanjuruhan. Saat ini, terdapat tujuh klinik, yakni penyakit dalam, jantung, saraf, jiwa, mata, telinga hidung tenggorokan (THT), dangizi.

Dari rencana pengembangan tersebut, layanan jantung akan diperkuat. Sementara layanan kanker, urologi, dan stroke menjadi layanan yang akan dikembangkan sebagai unit atau klinik baru.

Meski kebutuhan anggarannya telah diperkirakan, Pemkab Malang belum memastikan sumber pembiayaan pembangunan. Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah menggunakan skema KPBU. "Sekarang masih pembahasan. Semoga saja badan usaha tersebut mau dan dapat terlaksana," kata Tommie.

Tommie belum menyebut badan usaha yang berpotensi digandeng dalam proyek tersebut. Menurutnya, pihak yang diajak bekerja sama nantinya dapat berasal dari dalam maupun luar negeri.

Di sisi lain, rencana pengembangan RSUD Kanjuruhan

tersebut sebenarnya bukan gagasan baru. Tommie mengatakan, rencana itu telah dicetuskan sejak sekitar dua tahun lalu. Namun, hingga kini studi kelayakan atau feasibility study (FS) untuk proyek tersebut belum rampung.

Pemkab Malang berharap pembangunan fasilitas baru itu dapat mulai direalisasikan pada tahun ini. RSUD Kanjuruhan sendiri selama ini juga dikenal sebagai RSUD Panggung, yang berada di wilayah Panggungrejo, Kepanjen.

Tak hanya RSUD Kanjuruhan, Pemkab Malang juga menyiapkan rencana penambahan rumah sakit umum daerah di wilayah lain. Setelah memiliki RSUD di Ngantang, Lawang, dan Kepanjen, pemerintah daerah berencana membangun RSUD kelas B di Kecamatan Dampit.

Namun, rencana pembangunan RSUD Dampit tersebut masih belum menunjukkan perkembangan berarti. Rumah sakit itu direncanakan berdiri di atas lahan seluas sekitar 6,5 hektare.

"Masih belum. Makanya kami berharap ada penguatan dari nasional untuk dapat diwujudkan. Kami baru pada tahap menyampaikan kesediaan daerah untuk dibangun RSUD," kata Tommie. (Santi/Dya)(Santi/Dya)

MALANG - Pengembangan fasilitas layanan kesehatan di RSUD Kanjuruhan, Kabupaten Malang, diproyeksikan membutuhkan anggaran hingga Rp350 miliar. Untuk membiayai pembangunan sarana fisik tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tengah menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Pengembangan RSUD

Target BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang Naik jadi 46,47%, Kejar 21 Ribu Peserta Baru

MALANG - Target cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Malang naik menjadi 46,47 persen. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kini memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk menambah sekitar 21 ribu peserta guna memenuhi target baru tersebut.

"Yang sebelumnya, 41 sekian persen itu kami sudah sampai di 42 persen. Sekarang akhirnya kami diminta untuk memenuhi 46,67 persen," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, peningkatan cakupan kepesertaan tersebut bertujuan untuk memastikan semakin banyak pekerja, khususnya pekerja informal, mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Ini menjadi komitmen kami untuk benar-benar memperhatikan

pekerja terutama dari sektor informal agar ter-cover BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Sebelumnya, Pemkot Malang juga menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya dapat mencapai 100 persen pada 2035. Untuk menuju target tersebut, perluasan kepesertaan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak.

Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Malang, Zulkarnain Mahading, mengatakan target awal cakupan kepesertaan telah sesuai dengan RPJMD Kota Malang. Setelah target tersebut terlampaui, Kemendagri memberikan tantangan agar capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kota Malang dapat dipercepat menuju 100 persen.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, saat ini sebanyak

168.482 orang di Kota Malang telah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 41 persen dari cakupan yang menjadi target awal di tahun 2026 ini.

Untuk mencapai target baru sebesar 46,47 persen hingga akhir 2026, masih dibutuhkan sekitar 21.000 peserta tambahan.

Zulkarnain menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan mendorong keterlibatan berbagai pihak agar masyarakat yang telah menjadi peserta juga memahami manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurut Zulkarnain, perluasan



kepesertaan tersebut tidak hanya menasar pekerja informal. Seluruh kelompok pekerja menjadi sasaran perluasan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. (Santi/Dya)

Tangkapan layar video memperlihatkan MV June Aster yang hangus terbakar setelah kebakaran melanda kapal feri tersebut di lepas pantai Palawan, Filipina, Kamis (10/9/2026). (ist)



KEBAKARAN FATAL KAPAL FERI DI FILIPINA: 5 TEWAS, SEDIKITNYA 87 ORANG HILANG

Kebakaran melanda kapal feri M/V June Aster di perairan dekat Coron, destinasi wisata populer di Provinsi Palawan, Filipina, Rabu (9/9/2026) malam. Sedikitnya lima orang meninggal dunia, sementara 87 orang lainnya masih belum ditemukan dalam operasi pencarian dan penyelamatan yang berlangsung hingga Kamis (10/9/2026). Hingga berita ini diturunkan belum ada informasi korban dari Warga Negara Indonesia (WNI).

Kapal tersebut terbakar sekitar 2,2 kilometer dari lepas pantai ketika dalam perjalanan menuju Coron setelah berangkat dari Manila. Data pelacakan MarineTraffic menunjukkan June Aster memang bertolak dari Manila. Kapal itu membawa 134 orang berdasarkan manifest, terdiri atas 117 penumpang dan 17 awak kapal.

Kapten Penjaga Pantai Filipina, Noemi Cayabyab, mengatakan 42 orang telah diselamatkan dalam pembaruan awal, terdiri atas 38 penumpang dan empat awak kapal. Namun, laporan berikutnya dari Reuters dan BBC menyebut jumlah korban yang berhasil dievakuasi mencapai 43 orang. Perbedaan angka tersebut terjadi karena proses evakuasi dan pendataan masih berlangsung.

"Berdasarkan data yang kami miliki saat ini tentang orang yang diselamatkan (42) dan korban jiwa, kami masih memiliki 87 orang yang belum ditemukan," kata Cayabyab kepada stasiun radio lokal.

Ia menegaskan data tersebut masih bersifat sementara karena operasi pencarian dan penyelamatan belum selesai. "Agar lebih jelas, ini adalah data langsung dan dapat berubah karena operasi pencarian dan penyelamatan kami masih berlangsung," ujarnya.

Penjaga pantai masih berupaya memadamkan api ketika proses pencarian dilakukan. "Namun, kami belum dapat memperoleh informasi dari orang-orang yang diselamatkan karena kami belum dapat berbicara dengan mereka," kata Cayabyab. Rekaman yang dirilis Philippine Coast

Guard memperlihatkan June Aster dilalap api dan asap tebal membubung dari badan kapal.

Laporan BBC menyebut api mulai berkobar sekitar pukul 18.45 waktu setempat. Kapal ketika itu mendekati Coron. Arus laut yang kuat dan asap tebal menjadi kendala bagi petugas yang berusaha memadamkan api. Seorang penyintas, Roland Lerma, mengatakan kepada BBC bahwa ia sempat terapung di laut selama sekitar dua jam sebelum diselamatkan. "Saat itu cuaca sedang dingin. Jika penyelamatan terlambat, saya pasti sudah meninggal," katanya.

Penyebab kebakaran belum dipastikan. Penjaga pantai masih melakukan penyelidikan. Namun, wawancara awal terhadap sejumlah penyintas mengindikasikan api kemungkinan bermula dari ruang kargo kapal. BBC juga melaporkan sejumlah penumpang disebut tidak mengenakan jaket pelampung ketika insiden terjadi.

Operasi penyelamatan melibatkan Penjaga Pantai Filipina, militer, nelayan setempat, serta sejumlah pihak swasta. Tujuh penyintas dibawa ke rumah sakit di Culion, pulau tetangga yang memiliki kapasitas tempat tidur dan fasilitas kesehatan lebih besar. Para penyintas lainnya dibawa ke pusat evakuasi di Barangay Turda.

Besarnya jumlah orang yang belum ditemukan membuat keluarga penumpang terus mencari informasi.

KECELAKAAN MARITIM DI FILIPINA 2026:

Kecelakaan Maritim di Filipina 2026

- Insiden awal tahun yang melibatkan kapal wisata pribadi/komersial kecil.
- Tanggal Kejadian: 27 Januari 2026.
- Lokasi: Perairan Tingloy, Batangas.
- Dampak Korban: Tidak ada korban jiwa; seluruh 7 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat oleh otoritas Penjaga Pantai Filipina.

MV Trisha Kerstin 3 (26 Januari 2026)

- Kapal feri penumpang tenggelam di perairan Basilan yang mengakibatkan 18 orang tewas dan 24 hilang.

MBCA Amejara (19 Januari 2026)

- Perahu rekreasi tenggelam di lepas pantai Davao yang menyebabkan 7 orang tewas dan 7 lainnya hilang.



BBC melaporkan sejumlah keluarga menggunakan laman Facebook Penjaga Pantai Filipina dan pemerintah daerah Coron untuk mencari kerabat mereka. Salah satunya Rai Garcia yang memiliki tiga teman keluarga yang berada di dalam kapal. "Kami belum menerima kabar apa pun. Itulah sebabnya kami harus berkomentar di utas berita lokal hanya untuk mendapatkan informasi terkini," kata Garcia.

Persoalan keselamatan transportasi laut di Filipina kembali menjadu sorotan usai tragedi tersebut. Negara kepulauan dengan lebih dari 7.600 pulau itu sangat bergantung pada kapal feri untuk menghubungkan berbagai wilayah. Namun, kecelakaan laut masih berulang dan sebelumnya kerap dikaitkan dengan cuaca buruk, perawatan kapal, kepadatan penumpang, serta lemahnya penerapan aturan keselamatan.

Tragedi serupa terjadi pada Januari 2026 ketika sebuah feri bertingkat tiga yang membawa lebih dari 340 orang tenggelam di perairan Filipina bagian selatan. Sedikitnya 52 orang meninggal dunia. Pada 2023, kebakaran di kapal feri Lady Mary Joy 3 juga menewaskan 31 orang. Kapal tersebut berada dalam rute menuju Basilan dari Zamboanga City. (gus,rtr;ist/dya)

MV June Aster terbakar dengan kobaran api dan kepulan asap membubung setelah kebakaran melanda kapal feri tersebut di lepas pantai Palawan, Filipina; gambar ini diambil dari video resmi yang dirilis pada 9 September 2026 oleh Penjaga Pantai Filipina



MINUMAN PAGI PENDUKUNG KESEHATAN GINJAL

Memulai pagi dengan secangkir kopi atau teh mungkin sudah menjadi ritual bagi banyak orang. Namun, sebelum memilih minuman pertama setelah bangun tidur, ada satu organ yang juga perlu diperhatikan yaitu ginjal.

Ginjal bekerja sepanjang waktu menyaring limbah dari darah, membuang kelebihan cairan melalui urine, menjaga keseimbangan mineral dan elektrolit, serta membantu mengatur tekanan darah. Karena itu, apa yang diminum setiap hari ikut berperan dalam menjaga fungsi organ tersebut.

Salah satu kebiasaan paling sederhana adalah memastikan tubuh mendapatkan cairan yang cukup. National Kidney Foundation (NKF) menyebut hidrasi yang baik membantu ginjal membuang limbah melalui urine dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Namun, kebutuhan cairan setiap orang berbeda, bergantung antara lain pada usia, ukuran tubuh, aktivitas, iklim dan kondisi kesehatan. Lantas, apa yang bisa menjadi pilihan minuman pada pagi hari?

Air Putih

Air putih tetap menjadi pilihan paling sederhana dan aman bagi kebanyakan orang. Setelah tidur selama berjam-jam, tubuh tetap kehilangan cairan melalui pernapasan dan proses fisiologis lainnya. Minum air setelah bangun dapat membantu memenuhi kembali kebutuhan cairan sekaligus mendukung ginjal dalam memproduksi urine dan membuang zat sisa metabolisme.

NKF bahkan menempatkan air sebagai pilihan utama untuk kesehatan ginjal karena tidak mengandung gula, kalori, atau bahan tambahan yang tidak diperlukan. Hidrasi yang cukup juga membantu menurunkan risiko batu ginjal dan infeksi saluran kemih.

Namun, anggapan bahwa semua orang harus memaksakan diri minum tepat delapan gelas sehari juga tidak sepenuhnya tepat. Kebutuhan cairan bersifat individual.

Orang yang sehat umumnya dapat mengikuti rasa haus dan kebutuhan tubuh, sambil memperhatikan kondisi seperti cuaca panas, aktivitas fisik, demam, muntah atau diare.

Sebaliknya, orang dengan penyakit ginjal kronis stadium lanjut atau gagal ginjal, terutama pasien dialisis, justru mungkin harus membatasi asupan cairan. Terlalu banyak minum pada

kondisi tersebut dapat menyebabkan cairan menumpuk di tubuh.

Kopi Hitam

Bagi pencinta kopi, kabar baiknya, kopi tidak otomatis menjadi minuman yang harus dihindari untuk menjaga ginjal.

Sejumlah penelitian observasional justru menemukan hubungan antara konsumsi kopi dan risiko penyakit ginjal kronis yang lebih rendah. Salah satu studi kohort menemukan konsumsi satu cangkir kopi per hari berkaitan dengan risiko penyakit ginjal kronis yang lebih rendah dibandingkan tidak minum kopi. Konsumsi dua cangkir atau lebih juga menunjukkan hubungan serupa.

Penelitian lain terhadap lebih dari 14 ribu peserta yang diikuti hingga sekitar 24 tahun juga menemukan konsumsi kopi lebih tinggi berkaitan dengan risiko penyakit ginjal kronis yang lebih rendah setelah sejumlah faktor diperhitungkan.

Namun, temuan tersebut bukan berarti semakin banyak kopi semakin sehat. Hubungan yang ditemukan dalam penelitian semacam ini tidak otomatis membuktikan bahwa kopi secara langsung mencegah penyakit ginjal.

Pilihan yang lebih sederhana adalah kopi hitam tanpa tambahan gula berlebihan, sirup, atau krim tinggi gula.

National Kidney Foundation juga mengingatkan bahwa bagi orang dengan penyakit ginjal, kandungan tambahan pada kopi dapat menjadi persoalan karena susu dan krim dapat meningkatkan kandungan kalium maupun fosfor. Kafein juga dapat

menyebabkan kenaikan tekanan darah sementara pada sebagian orang. Jadi, kopi boleh menjadi bagian dari rutinitas pagi, tetapi porsi tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh.

Teh Hijau Tawar

Teh hijau bisa menjadi alternatif bagi mereka yang menginginkan minuman dengan kafein lebih rendah dibandingkan kopi. Teh hijau mengandung polifenol, yaitu kelompok senyawa tanaman yang memiliki aktivitas antioksidan. Sejumlah penelitian epidemiologi juga mengeksplorasi hubungan konsumsi teh dengan kesehatan ginjal.

Salah satu studi prospektif besar di Jepang yang melibatkan lebih dari 110 ribu orang menemukan konsumsi teh hijau berkaitan dengan risiko kematian akibat penyakit ginjal kronis yang lebih rendah pada perempuan dalam beberapa kategori konsumsi. Namun, hubungan tersebut tidak ditemukan pada laki-laki dan penelitian itu sendiri tidak membuktikan hubungan sebab-akibat.

Jus Cranberry Tanpa Gula

Jus cranberry juga kerap dikaitkan dengan kesehatan saluran kemih. Buah cranberry mengandung senyawa yang diteliti karena potensinya menghambat bakteri menempel pada saluran kemih. Namun, perlu dibedakan antara kesehatan saluran kemih dan kesehatan ginjal. Jus cranberry bukan pengganti pengobatan infeksi saluran kemih, apalagi infeksi ginjal.

Untuk pilihan sehari-hari, jika memilih jus cranberry, perhatikan

labelnya. Banyak produk jus mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. NKF memasukkan jus buah tanpa tambahan gula sebagai salah satu pilihan minuman yang dapat dikonsumsi secara moderat, sekaligus mengingatkan konsumen untuk memperhatikan kandungan gula dan nutrisi pada produk kemasan.

Dengan kata lain, segelas jus cranberry tidak otomatis lebih sehat hanya karena mengandung cranberry. Jenis produk dan jumlah yang dikonsumsi tetap penting. Menjaga ginjal tidak cukup hanya dengan memilih minuman yang tepat setiap pagi.

Pola makan seimbang, aktivitas fisik, menjaga berat badan, mengontrol tekanan darah dan gula darah, serta menghindari kebiasaan yang dapat merusak ginjal tetap menjadi bagian penting dari pencegahan penyakit ginjal.

Penyakit ginjal kronis juga sering berkembang tanpa gejala pada tahap awal. NKF mencatat kondisi tersebut dapat berlangsung perlahan dan baru menimbulkan masalah ketika fungsi ginjal sudah mengalami penurunan. (far,ist/dya)



Benarkah Ring of Fire Makin Aktif?

Rentetan gempa dan erupsi gunung api yang terjadi di sejumlah wilayah dalam waktu berdekatan kembali mengingatkan Indonesia pada satu kenyataan geologis jika negeri ini berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire.

Presiden Prabowo Subianto menyebut posisi tersebut sebagai konsekuensi geografis yang membuat Indonesia harus selalu siap menghadapi bencana geologi.

Dalam periode yang sama, Indonesia menghadapi sejumlah aktivitas kebumih, termasuk gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur, serta aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Namun, apakah rentetan kejadian tersebut menandakan Ring of Fire sedang mengalami peningkatan aktivitas? Jawabannya tidak sesederhana itu.

Wilayah Pertemuan Lempeng

Ring of Fire bukanlah lingkaran api yang secara harfiah mengelilingi Samudra Pasifik. Istilah tersebut merujuk pada zona panjang berbentuk menyerupai tapal kuda yang mengitari Samudra Pasifik dan menjadi salah satu kawasan paling aktif secara tektonik di Bumi.

Menurut Badan Oseanik dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat (NOAA), aktivitas vulkanik yang tinggi di kawasan tersebut terutama berkaitan dengan zona subduksi.

Membentang 40 Ribu Km

Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menjelaskan sebagian besar

gempa bumi dan letusan gunung api tidak muncul secara acak. Banyak di antaranya terkonsentrasi di sepanjang batas lempeng tektonik.

Kawasan ini memiliki lebih dari 450 gunung berapi dan membentang hampir 40.250 kilometer. Jalurnya membentuk pola seperti tapal kuda, mulai dari ujung selatan Amerika Selatan, menyusuri pantai barat Amerika Utara, melewati kawasan Selat Bering, kemudian bergerak menuju Jepang hingga Selandia Baru.

Dengan karakter tersebut, Ring of Fire memang merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas seismik dan vulkanik tertinggi di dunia.

Tetapi tingginya aktivitas tektonik kawasan ini bukan berarti setiap rangkaian gempa yang terjadi di sepanjang Pasifik menunjukkan adanya suatu "anomali" global.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, mengatakan persepsi mengenai meningkatnya aktivitas Cincin Api perlu ditempatkan dalam konteks statistik kegempaan global.

Mengacu pada data USGS, sekitar 500.000 gempa terdeteksi di seluruh dunia setiap tahun. Angka tersebut mencakup gempa yang sangat kecil, bahkan tidak dirasakan manusia, tetapi dapat direkam oleh instrumen seismologi.

Sekitar 90 persen gempa dunia terjadi di kawasan Cincin Api Pasifik. Dengan demikian, secara kasar dapat terjadi sekitar 450.000 gempa per tahun di kawasan tersebut.

Daryono menyebut fenomena tersebut sebagai efek clustering atau

klusterisasi waktu.

"Persepsi bahwa Cincin Api sedang lebih aktif biasanya dipicu oleh efek klusterisasi waktu, yaitu kondisi ketika beberapa gempa signifikan kebetulan terjadi dalam waktu yang berdekatan, serta kecepatan penyebaran informasi di media sosial yang membuat gempa di wilayah terpencil kini bisa langsung diketahui publik dalam hitungan menit," jelas Daryono.

Gempa besar Terjadi Secara Normal

Secara global, aktivitas gempa pada 2026 masih berada dalam kisaran fluktuasi statistik yang normal dan tidak menunjukkan angka di atas rata-rata historis jangka panjang, menurut penjelasan Daryono.

Bagi Indonesia, persoalannya memang berbeda. Negara kepulauan ini berada di salah satu kawasan tektonik paling kompleks di dunia.

Indonesia berada di sekitar

pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, yakni Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Karena itu, keberadaan banyak gunung api aktif dan tingginya potensi gempa bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba pada 2026.

Ia merupakan konsekuensi geologi jangka panjang dari posisi Indonesia.

Daryono menegaskan gempa yang terjadi di wilayah seperti Venezuela, Jepang, atau California tidak akan secara otomatis memicu gempa di Indonesia karena jaraknya sangat jauh dan sistem tektonik yang bekerja pada masing-masing wilayah berbeda.

Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa siap masyarakat dan pemerintah menghadapi gempa atau erupsi yang memang secara geologis dapat terjadi kapan saja.

Bagi Indonesia, Cincin Api bukan fenomena musiman. Ia adalah kondisi geologi yang melekat pada posisi geografis negara ini. (far,ist/dya)



LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI

OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)

PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)

download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Tren Alami Perawatan Rambut dengan Air Rosemary

Rosemary belakangan tak hanya dikenal sebagai tanaman aromatik untuk masakan. Di media sosial, tanaman dengan nama ilmiah *Salvia rosmarinus* ini ikut menjadi bahan pembicaraan dalam dunia perawatan rambut. Air rebusan rosemary hingga minyak rosemary digunakan sebagai bagian dari rutinitas perawatan dengan harapan rambut tumbuh lebih lebat, kulit kepala lebih sehat, dan kerontokan berkurang.

Tren tersebut bukan sepenuhnya tanpa dasar. Sejumlah penelitian memang menemukan potensi rosemary untuk mendukung kesehatan rambut dan kulit kepala. Namun, bukti ilmiahnya masih terbatas sehingga rosemary sebaiknya ditempatkan sebagai pelengkap perawatan, bukan pengganti terapi medis untuk kerontokan rambut.

Salah satu penelitian yang paling sering menjadi rujukan adalah uji klinis acak yang membandingkan minyak rosemary dengan minoxidil 2 persen pada pria dengan androgenetic alopecia atau kebotakan berpola akibat faktor genetik.

Penelitian yang diterbitkan pada 2015 itu menemukan bahwa kedua kelompok mengalami peningkatan jumlah rambut setelah enam bulan

penggunaan. Namun, hasil tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Tinjauan ilmiah mengenai terapi androgenetic alopecia yang diterbitkan dalam jurnal *Drugs* pada 2023 menyebut penelitian rosemary tersebut melibatkan 100 pria dan menggunakan lotion rosemary dengan konsentrasi 3,7 miligram per mililiter, dibandingkan dengan minoxidil 2 persen.

Kedua kelompok mengalami peningkatan jumlah rambut setelah enam bulan dan efek samping berupa rasa gatal juga ditemukan pada kedua kelompok. Para peneliti sekaligus menekankan bahwa berbagai penelitian terapi rambut masih memiliki keterbatasan dalam ukuran sampel, metode, serta lama pemantauan.

Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap rosemary belum surut. Sebuah tinjauan yang diterbitkan *Dermatology Reports* pada Februari 2026 secara khusus membahas berbagai bahan alami untuk pertumbuhan rambut dengan fokus pada rosemary. Artinya, rosemary masih menjadi objek penelitian, tetapi keberadaan penelitian tidak otomatis berarti khasiatnya sudah terbukti setara dengan terapi medis yang telah mapan.

Dukung Sirkulasi Kulit Kepala

Salah satu alasan rosemary banyak digunakan dalam perawatan rambut adalah potensinya terhadap sirkulasi mikro di kulit kepala. Secara teori, kondisi kulit kepala yang sehat dan pasokan darah yang baik dapat membantu menyediakan lingkungan yang mendukung fungsi folikel rambut. Rosemary juga diketahui mengandung sejumlah senyawa bioaktif, termasuk asam

rosmarinat dan turunan diterpena seperti asam karnosol. Senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan dan menjadi salah satu alasan rosemary menarik perhatian dalam penelitian mengenai kesehatan rambut.

Bantu Lebih Tebal

Bagi orang yang mengalami rambut menipis, rosemary menjadi salah satu alternatif perawatan alami yang populer. Studi 2015 menunjukkan minyak rosemary dan minoxidil 2 persen sama-sama menghasilkan peningkatan jumlah rambut setelah enam bulan pada kelompok penelitian.

Meski demikian, hasil itu tidak dapat langsung diartikan bahwa air rosemary memiliki efek yang sama. Penelitian tersebut menggunakan minyak rosemary, bukan air rebusan rosemary.

Perbedaan bentuk, konsentrasi, metode ekstraksi, dan cara pemakaian membuat hasil penelitian minyak tidak bisa begitu saja diterapkan pada air rosemary buatan sendiri.

Bantu Atasi Kerontokan

Kerontokan akibat androgenetic alopecia merupakan kondisi kronis yang dipengaruhi faktor genetik dan hormon. Karena itu, penanganannya tidak sesederhana mengganti sampo atau menggunakan bahan alami tertentu.

Tinjauan *Androgenetic Alopecia: Therapy Update* menyebut rosemary oil sebagai salah satu minyak nabati yang pernah menunjukkan hasil dalam penelitian klinis. Namun, tinjauan

tersebut juga menegaskan perlunya penelitian dengan sampel lebih besar, desain yang lebih kuat, serta perbandingan langsung antar terapi untuk memperoleh kesimpulan yang lebih meyakinkan.

Media internasional *The Washington Post* juga menyoroti popularitas rosemary oil yang meningkat di media sosial pada 2026. Para dermatolog yang dikutip mengingatkan bahwa bukti untuk pertumbuhan kembali rambut masih terbatas dan manfaatnya tidak dapat disamakan dengan terapi yang memiliki dukungan bukti lebih kuat seperti minoxidil.

Antioksidan Lindungi dari UV

Manfaat lain yang menarik datang dari penelitian mengenai paparan sinar ultraviolet. Rambut yang terus-menerus terpapar matahari dapat mengalami kerusakan protein sehingga menjadi lebih kering, rapuh, dan kehilangan kualitasnya.

Penelitian yang diterbitkan dalam *International Journal of Cosmetic Science* pada 2023 menguji sejumlah ekstrak rosemary dan menemukan aktivitas antioksidan.

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa ekstrak tertentu mampu membantu melindungi rambut dari kerusakan protein akibat paparan UV. (far,ist/dya)

Cara Membuat Air Rosemary di Rumah

Siapkan bahan
- 5 cangkir air
- 5 tangkai rosemary segar

1. Rebus rosemary
2. Masukkan rosemary ke dalam air, sekitar 15 menit. Kecilkan api
3. Setelah mendidih, kecilkan api.
4. Lanjutkan pemanasan hingga air berubah menjadi merah muda atau kemerahan.
5. Dinginkan
6. Matikan api dan biarkan air rosemary hingga mencapai suhu ruang.
7. Saring
8. Pisahkan air dari daun dan batang rosemary.
9. Gunakan pada rambut
10. Air rosemary dapat diaplikasikan pada rambut atau kulit kepala sesuai kebutuhan.
11. Belum ada penelitian yang menetapkan frekuensi dan durasi penggunaan terbaik, sehingga jangan menganggap resep ini sebagai dosis medis.



Tatkala Hutan Lampung ..dari Hal 1

FAKTA KASUS DUGAAN KORUPSI LAHAN TEBU

Lanjutan di Hal 1...

PERKEMBANGAN

PENYIDIKAN

- 47 saksi telah diperiksa.
- Dokumen telah disita.
- Jajaran PT Inhutani V turut diperiksa.
- Belum ada tersangka yang ditetapkan.
- Penyidik meminta bantuan ahli untuk menghitung kerugian negara.

KRONOLOGI

PENANGANAN

- o **5 Januari 2026:**
Kejati Lampung menerbitkan surat perintah penyidikan.
- o **Februari 2026:**
PT PSMI menipiskan Rp100 miliar ke RPL Kejati Lampung.
- o **11 Mei 2026:**
Penanganan perkara diserahkan terimakan dari Kejati Lampung kepada Kejagung.
- o **7 September 2026:**
Pengambilalihan perkara diumumkan kepada publik.



Kejaksaan menduga kegiatan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Perkara ini disidik Kejati Lampung berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-01/L.8/Fd.2/01/2026 tertanggal 5 Januari 2026. Dalam perkembangannya, perkara tersebut kemudian ditarik ke tingkat pusat karena dinilai memiliki kompleksitas dan dimensi nasional.

Sebelum angka Rp1,003 triliun muncul, PT PSMI telah lebih dahulu menipiskan Rp100 miliar kepada Kejati Lampung pada Februari 2026. Uang tersebut dimasukkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejati Lampung sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara yang diduga timbul dari perkara tersebut.

Perkara kemudian berkembang. Pada 11 Mei 2026, pengambilalihan penanganan perkara dari Kejati Lampung ke Kejaksaan Agung dilakukan melalui Berita Acara Serah Terima Penanganan Perkara. Namun, pengumuman mengenai pengambilalihan baru disampaikan Kejagung kepada publik pada 7 September 2026.

Danang menjelaskan alasan pengambilalihan itu ketika memberikan keterangan pada 5 Agustus 2026. Menurut dia, perkara tidak hanya menyangkut pemanfaatan kawasan hutan, tetapi juga persoalan perizinan kehutanan, penguasaan lahan, penerimaan negara, serta potensi kerugian keuangan negara.

"Perkara ini diambil alih oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung untuk menjamin efektivitas penanganan, keseragaman kebijakan penegakan hukum, optimalisasi pemulihan kerugian negara, serta memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang memiliki kompleksitas dan dimensi nasional," ujar Danang.

Ia juga menegaskan bahwa pengembalian uang tidak otomatis

menghentikan perkara pidana.

"Penitipan uang maupun pengembalian kerugian negara merupakan bagian dari mekanisme asset recovery dan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Danang pada 5 Agustus 2026.

1.268 Hektare Kebun Tebu

Setelah perkara ditarik ke Kejagung, konstruksi kasus mulai diperjelas. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar, mengatakan penyidik menemukan dugaan perbuatan melawan hukum berupa penanaman tebu oleh PT PSMI di kawasan PT Inhutani V.

Keterangan itu disampaikan Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, pada Senin, 7 September 2026.

"Peristiwa pidana yang dilakukan PT PSMI melakukan penanaman perkebunan tebu di kawasan PT Inhutani V Lampung tersebut telah melawan hukum dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara," kata Saiful.

Luas lahan yang telah dibuka untuk kebun tebu mencapai 1.268 hektare. Namun, angka tersebut tidak serta-merta berarti seluruh 1.268 hektare merupakan kawasan hutan.

"Luas lahan yang dilakukan pembukaan untuk kebun tebu seluas 1.268 hektare yang beririsan di dalam kawasan PT Inhutani. Sedangkan terkait dengan selebihnya, itu di dalam kawasan hutan yang masih dalam proses penyidikan kami," ujar Saiful pada 7 September 2026.

Dengan kata lain, penyidik masih mengurai bagian lahan mana yang berada dalam kawasan PT Inhutani V dan bagian mana yang masuk kawasan hutan. Penghitungan kerugian negara pun belum final.

Kejagung menyatakan penyidik telah memeriksa 47 saksi, menyita

dokumen dan meminta bantuan ahli untuk menghitung kerugian negara. Data tersebut disampaikan Saiful dalam konferensi pers 7 September 2026.

"Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 47 orang saksi dan melakukan penyitaan dokumen-dokumen, serta telah melakukan permintaan perhitungan kepada ahli," kata Saiful.

Kejagung juga belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk mengonstruksikan peristiwa pidana dan menentukan pihak yang bertanggung jawab.

"Tim penyidik masih melakukan pemeriksaan-pemeriksaan saksi-saksi, melakukan penyitaan-penyitaan, dan melakukan alat bukti lainnya untuk meng-konstruksikan peristiwa pidana yang terjadi dan menemukan pelaku yang bertanggung jawab terkait dengan peristiwa pidana tersebut," ujar Saiful pada 7 September 2026.

Petinggi Inhutani Diperiksa

Penyidikan kemudian bergerak ke jajaran PT Inhutani V. Pada Rabu, 9 September 2026, Kejagung memeriksa dua saksi, yakni AK selaku Dewan Komisaris PT Inhutani V dan ES selaku direksi PT Inhutani V periode 2012-2017. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan terhadap kedua saksi dilakukan dalam rangka penyidikan yang sedang berjalan. Dalam keterangannya, Anang tidak membeberkan materi pemeriksaan.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Anang.

Ia menegaskan proses penyidikan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," ujar Anang.

Sebelum ditangani Kejagung, penyidik Kejati Lampung juga telah memeriksa sejumlah pihak dari perusahaan, pemerintah daerah, kelompok tani dan petani. Dalam pemberitaan mengenai perkembangan perkara sebelumnya, mantan Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya serta ayahnya, Raden Kalbadi, disebut pernah dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, keterangan tersebut tidak berarti keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. (wid,rls,kum,ist/dya)

Uang senilai Rp1,003 triliun telah diamankan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam perkara dugaan korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan di Kabupaten Way Kanan. Uang itu kini menjadi bagian dari perkara yang telah diambil alih Kejaksaan Agung.

Nilainya mencapai Rp1.003.680.250.000. Tetapi angka tersebut belum dapat disebut sebagai angka kerugian negara final, apalagi langsung sebagai uang hasil korupsi. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung saat itu, Danang Suryo Wibowo, menyebut uang tersebut merupakan uang titipan dan uang sitaan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

"Hingga saat ini tim penyidik telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp1.003.680.250.000. Jumlah tersebut merupakan uang titipan dan uang sitaan untuk pengembalian kerugian keuangan negara," kata Danang dalam pemaparan perkembangan perkara pada Rabu, (5/9/2026).

Angka triliunan itu berkaitan dengan penyidikan terhadap PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI), perusahaan yang diduga melakukan penanaman tebu pada areal PT Inhutani V di Provinsi Lampung.



DPRD dan Pemprov Jatim Rumuskan Aturan Transportasi Berbasis Aplikasi

SURABAYA - DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi. Berbagai pandangan fraksi di DPRD Jatim menjadi pertimbangannya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Hidayat, mengungkapkan pandangan yang disampaikan setiap fraksi dalam pembahasan Raperda akan dirumuskan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Targetnya bisa menghasilkan regulasi yang dapat diterima dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Setiap fraksi di DPRD Jawa Timur memberikan pandangannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Jatim tentang Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi. Tanggapan ini akan kita rumuskan bersama Gubernur untuk nantinya dapat menjadi peraturan daerah yang dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur," ungkap Hidayat dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (10/09/2026).

Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Laili Abidah, menekankan pentingnya memastikan perlindungan pengemudi tetap menjadi bagian utama dalam Raperda.

Menurutnya, penyesuaian kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan biaya jasa sepeda motor tidak boleh menghilangkan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Provinsi terhadap perusahaan aplikasi.

PKB juga menilai perlu adanya evaluasi tarif secara berkala dengan melibatkan unsur pengemudi. Transparansi komponen pembentuk tarif dan potongan biaya aplikasi juga dinilai penting untuk memastikan posisi pengemudi tetap terlindungi.

"Fraksi PKB meminta agar Raperda tetap mengatur secara kuat fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur atas kepatuhan penyelenggara terhadap pedoman biaya jasa yang ditetapkan Menteri, disertai mekanisme evaluasi tarif secara berkala yang melibatkan unsur pengemudi, agar keterbukaan



Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna, Hidayat

komponen pembentuk tarif tetap terjaga," terang Laili.

Selain persoalan tarif, PKB meminta adanya perbedaan yang jelas antara pelanggaran sistemik di tingkat perusahaan aplikasi dan pelanggaran individual pengemudi.

Hal tersebut dinilai penting agar pengemudi yang memiliki posisi tawar lebih lemah tidak menjadi pihak yang paling mudah dikenai sanksi.

"PKB juga memasukkan sejumlah catatan lain, seperti perluasan akses jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bagi pengemudi, keterbukaan komponen tarif dan potongan biaya aplikasi, serta tata kelola dan audit data perusahaan aplikasi," tuturnya.

Sementara itu, Fraksi PAN DPRD Jawa Timur menyoroti cakupan regulasi yang dinilai masih menyisakan ruang pengaturan terhadap taksi daring dan kurir logistik roda empat.

Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Jatim, Husnul Aqib, mengatakan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online baru mengatur

layanan sepeda motor atau ojek daring. Karena itu, PAN menilai ruang pengaturan pada segmen lain perlu dipertimbangkan sepanjang masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Kekosongan pengaturan pada segmen perlu kita pertimbangkan juga guna mengisi ruang kekosongan hukum tersebut secara proporsional, sepanjang termasuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi, tanpa bertentangan dengan semangat sinkronisasi dan harmonisasi regulasi yang juga digaribawahi oleh Saudara Gubernur," jelasnya.

PAN juga menekankan pentingnya sinkronisasi vertikal dengan regulasi pemerintah pusat. Raperda, menurut PAN, perlu memberikan ruang penyesuaian apabila kebijakan pemerintah pusat mengenai transportasi berbasis aplikasi mengalami perkembangan.

Selain cakupan layanan, PAN turut menyoroti pengawasan kepatuhan perusahaan aplikasi terhadap batas komisi maksimal 8 persen sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Fungsi

pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dinilai dapat diarahkan untuk memastikan ketentuan tersebut dijalankan oleh penyelenggara.

Lebih lanjut Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur memberikan perhatian pada aspek tata kelola data transportasi berbasis aplikasi. Fraksi tersebut menilai penguatan sistem data dan Digital Dashboard diperlukan untuk mendukung perencanaan, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi layanan transportasi di Jawa Timur.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Indriani Yulia Mariska, mengatakan data transportasi tidak cukup hanya dikumpulkan, tetapi harus diolah menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan.

"Pemanfaatan Digital Dashboard dapat menjadi instrumen bagi Pemerintah Provinsi untuk memperoleh gambaran perkembangan layanan secara lebih terukur, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi," kata Indri.

Menurut PDI Perjuangan, penguatan basis data diperlukan agar kebijakan pemerintah daerah tidak bersifat reaktif, melainkan mampu mengikuti kondisi dan perkembangan transportasi di lapangan. Sistem data tersebut juga perlu dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan kendaraan dan perkembangan mobilitas masyarakat.

"Karena itu, keterkaitan antara sistem data transportasi, perencanaan, dan pengawasan perlu dijaga agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan kondisi lapangan dan dapat dievaluasi secara berkala," pungkasnya. (adv,pra/dya)



Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Laili Abidah saat Menyerahkan Pandangan Fraksi kepada Pimpinan DPRD Jatim



Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Indriani Yulia Mariska saat Menyerahkan Pandangan Fraksi kepada Pimpinan DPRD Jatim